

## **Implementation of the Return to Village Policy Through the Coffee Farmer Program for Community Empowerment in Paniai Regency**

**Sepo Nawipa<sup>1\*</sup>, Rima Nusantriani Banurea<sup>2</sup>, Fitrine Christiane Abidjulu<sup>3</sup>**  
Universitas Cenderawasih

**ABSTRACT:** The pattern of people moving from villages to cities has become a pattern in various places, including in Paniai Regency. This pattern makes the village 'abandoned', while the city becomes congested. Therefore, the Paniai Regency Government issued a Return to Kampung policy so that the Paniai community returned and built a village. This policy has a derivative program for Coffee Farmers, all of which are funded by the Regency government. Therefore, this study looks at the implementation of these policies from the government's perspective. This study used qualitative research methods. The data was taken using the Literature Study Technique sourced from the news media that wrote about this activity, the Paniai district government website and social media channels. The result of this research is that the coffee planting program is able to make the Paniai community return to their village and empower the Paniai community

**Keywords:** coffee, social policy, empowerment, paniai

**Corresponding Author:** [rma.banurea@gmail.com](mailto:rma.banurea@gmail.com)

## **Pelaksanaan Kebijakan Pulang Kampung Melalui Program Petani Kopi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Paniai**

**Sepo Nawipa<sup>1\*</sup>, Rima Nusantriani Banurea<sup>2</sup>, Fitrine Christiane Abidjulu<sup>3</sup>**  
Universitas Cenderawasih

**ABSTRAK:** Pola perpindahan masyarakat dari kampung ke kota sudah menjadi pola di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Paniai. Pola ini membuat kampung menjadi 'terlantar', sedangkan kota menjadi padat. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Paniai mengeluarkan kebijakan Pulang Kampung agar masyarakat Paniai kembali dan membangun kampung. Kebijakan ini memiliki program turunan Petani Kopi yang kesemuanya dimodali oleh pemerintah Kabupaten. Oleh sebab itu penelitian ini melihat pelaksanaan kebijakan tersebut dari perspektif pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diambil dengan Teknik Studi Pustaka yang bersumber dari media berita yang menulis tentang kegiatan ini, website pemerintah kabupaten Paniai dan kanal media sosial. Hasil penelitian ini adalah program tanam kopi ini mampu membuat masyarakat Paniai kembali ke kampung dan memberdayakan masyarakat Paniai

**Kata kunci:** kopi, kebijakan sosial, pemberdayaan, paniai

*Submitted: 11 April; Revised: 21 April; Accepted: 26 April*

**Corresponding Author:** [rima.banurea@gmail.com](mailto:rima.banurea@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kota selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Pembangunan fisik yang maju pesat, akses komunikasi yang lancar, dan budaya urban penuh gaya selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat di kampung untuk pindah dan menetap ke kota. Pola perpindahan ini tentu berimplikasi baik bagi kota yang didatangi maupun bagi kampung yang ditinggalkan. Bagi kota yang didatangi implikasinya bisa beragam. Salah satunya adalah kepadatan penduduk yang bisa menghasilkan berbagai dampak turunan seperti sempitnya lapangan pekerjaan, sempitnya lahan pemukiman, hingga langkanya air bersih. Sedangkan bagi kampung yang ditinggalkan, sudah dipastikan dampaknya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk membangun kampung.

Pola perpindahan ini, secara serius diperhatikan pemerintah Kabupaten Paniai. Selama bertahun-tahun, kebanyakan masyarakat di kampung dan distrik di Kabupaten Paniai, terutama anak mudanya, lebih tertarik untuk pergi dan berpindah ke Ibukota Kabupaten atau keluar dari Kabupaten Paniai untuk bekerja. Hal ini tentu sangat signifikan bagi pembangunan kampung Kabupaten Paniai yang berjumlah 216 kampung.

Berdasarkan realitas ini, pemerintah Kabupaten Paniai menggagas kebijakan Pulang Kampung untuk Membangun. Kebijakan ini dibuat untuk mengajak masyarakat kembali ke kampung dan membangun kampung. Bupati Meki Nawipa menyatakan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan jangka panjang, yakni menghapus budaya ketergantungan masyarakat. Menurut Nawipa, masyarakat yang selama ini menjadi masyarakat konsumtif perlu dilatih untuk memproduksi komoditas dari kampung secara mandiri, agar ekonomi rakyat berbasis lokal bisa terbangun (Wagadei, 2018)

Program unggulan dari kebijakan ini adalah Program Petani Kopi. Program ini mengajak masyarakat Kabupaten Paniai untuk kembali ke kampung dan bertani kopi. Setiap petani, diwajibkan menanam minimal 200 pohon kopi. Bagi masyarakat yang bersedia, akan diberikan Kartu Tani Kopi. Kartu ini nantinya dapat digunakan Petani Kopi Paniai untuk mengakses dana insentif petani, pupuk, alat sistem pertanian, dan sebagai alat transaksi hasil panen (Metro Merauke, 2021)

Pemilihan kopi sendiri juga bukan sembarangan. Kopi dipilih karena tanaman ini cocok tumbuh di suhu udara Paniai yang berada di ketinggian 1700-3000 mdpl. Saat ini jenis kopi yang dibudidayakan adalah Kopi Arabica. Kopi Arabica telah terbukti tumbuh dengan baik di Paniai dengan hasil yang

berkualitas. Selain faktor udara dan kualitas kopi, pasar yang selalu terbuka baik di pasar nasional maupun internasional menjadi pertimbangan bagi budidaya tanaman kopi di Kabupaten Paniai (Wagadei, 2018).

Menurut pengamatan sementara, saat ini program ini sudah berjalan satu tahun. Sejak tanggal 23 April 2021 para petani kopi sudah mulai membuat dan mengaktifkan rekening di Bank Papua untuk dapat menerima insentif. Saat ini insentif yang diberikan adalah satu pohon kopi dihargai Rp 2.500. Insentif ini dibayar per bulan. Jadi semakin banyak pohon kopi yang ditanam, maka semakin banyak pula insentif yang akan didapatkan Petani Kopi. Kemudian hasil penjualan kopi nantinya juga dikembalikan lagi kepada masyarakat. Program ini juga mendorong agar kopi menjadi komoditas utama dari Kabupaten Paniai (Palen, 2021).

Walau program ini baru berjalan sekitar satu tahun, namun animo masyarakat Paniai cukup tinggi. Oleh sebab itu, menarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program Petani Kopi sebagai turunan dari kebijakan Pulang Kampung untuk Membangun di Kabupaten Paniai. Kajian ini dianggap penting karena tidak banyak kepala daerah di Papua yang mengeluarkan kebijakan agar masyarakatnya kembali ke daerah. Selain itu kebijakan ini sangat menarik karena jika pelaksanaannya berhasil maka dapat menghasilkan dua hal sekaligus yakni: masyarakat Paniai kembali membangun Kampung dan Kopi menjadi komoditas utama Kabupaten Paniai.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan Sosial**

Analisis kebijakan sosial berdasarkan pada prinsip atau patokan umum yang membentuk kerangka analisis. Kerangka analisis tersebut secara umum berpijak pada dua pedoman, yakni fokus dan parameter analisis. Analisis kebijakan dapat difokuskan setidaknya dalam tiga fokus yakni definisi masalah sosial, implementasi kebijakan sosial dan akibat-akibat kebijakan sosial. Namun penelitian ini akan fokus pada implementasi kebijakan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan, diperlukan parameter analisis yakni penelitian dan rasionalisasi, orientasi nilai dan pertimbangan politik. Ketiga parameter tersebut akan diaplikasikan dalam penelitian ini menggunakan analisis Quade yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Quade untuk Implementasi Kebijakan Sosial

Fokus	Parameter		
	Penelitian dan Rasionalisasi	Nilai-nilai	Politik
<b>Impelementasi Kebijakan Sosial</b> -Apa tujuan kebijakan sosial? -Program dan pelayanan sosial apa yang diberikan? -Bagaimana struktur organisasinya? -Bagaimana kebijakan tersebut didanai?	-Apakah tujuan kebijakan konsisten dengan penelitian dan pendefinisian masalah? -Apa bentuk pelayanan sosial yang diberikan? --- Apakah penelitian pendukung pelayanan sosial yang dipilih? -Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan kebijakannya? -Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sesuai dengan penelitian dan rasionalisasi?	-Nilai-nilai apa yang mempengaruhi tujuan kebijakan? - Apakah nilai-nilai tersebut sudah tepat? -Apakah kebijakan memperlakukan individu sesuai dengan kesamaan, kesetaraan, kelayakan dan penentuan nasib sendiri individu? - Apakah struktur organisasi mendukung efektifitas dan efisiensi pemberian layanan? -Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sejalan dengan nilai?	-Seberapa besar tingkat kekuasaan yang menentang kebijakan ? Bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan? -Adakah dukungan memadai yang memungkinkan kebijakan diterapkan? -Individu dan kelompok mana yang akan diuntungkan oleh kebijakan ini? Apa dampaknya bagi implementasi kebijakan? -Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sejalan dengan politik?

Sumber: (Suharto, 2014)

## Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* secara harafiah berarti pemberkuasaan, yakni pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah. Jim Ife mengatakan (dalam Suharto, 1997) bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha '*reallocation of power*' melalui perubahan struktur sosial. Swift dan Levin mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan untuk mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dalam rangka mencapai kekuasaan atau keberdayaan tersebut, setidaknya usaha-usaha pemberdayaan dilakukan dengan memuat 5 dimensi pemberdayaan yakni (Suharto, 1997) :

1. Pemungkinan (*enabling*), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi klien berkembang dengan maksimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan individu atau masyarakat dari sekat-sekat kultural atau struktural yang menghambat.
2. Penguatan (*empowering*), yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki individu atau masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian.
3. Perlindungan (*protecting*), yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Perlindungan juga menghindari persaingan tidak seimbang (tidak sehat) antara yang kuat dan lemah. Perlindungan juga mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi rakyat lemah (atau dilemahkan), kelompok-kelompok yang tidak beruntung serta masyarakat terasing.
4. Penyokongan (*supporting*) yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar individu atau masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong individu atau masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan (*fostering*) yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan berusaha.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan program Petani Kopi di Kabupaten Paniai. Pengambilan data dalam penelitian ini diarahkan pada level pengambil kebijakan melalui Studi Pustaka. Sumber data dari penelitian ini adalah media-media berita yang menulis tentang kebijakan ini, website pemerintah Kabupaten Paniai serta kanal media sosial seperti Youtube yang memuat tentang pidato Bupati Kabupaten Paniai. Data-data ini diambil untuk bisa menggali perspektif pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program ini. Selain itu penelitian ini melihat secara teknis bagaimana implementasi kebijakan di lapangan selama satu tahun yakni tahun 2020-2021.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Sejarah Kopi di Paniai**

Pertanian Kopi di Papua sudah ada sejak tahun 1950-an. Pertanian ini diinisiasi oleh Belanda dan Para Misionaris yang saat itu sedang mendorong pembangunan Pasca Perang Dunia II. Hasil dari pertanian kopi tersebut sempat disajikan pada temu diskusi Ratu Wilhelmina dengan delapan pejabat Papua yang saat itu sedang membicarakan dinamika Papua (Sarwan & Prasetyo, 2020).

Paniai kemudian menjadi wilayah pertama di tanah Papua yang dipilih Belanda untuk mengembangkan tanaman kopi jenis Arabika. Wilayah ini dipilih karena pada masa itu akses jalan masuk ke pedalaman belum ada, sehingga Danau Paniai adalah lokasi tepat untuk melakukan pendaratan di air (Sintesanews, 2020). Selain itu tentu saja letak geografis Paniai yang berada di ketinggian 1.700-2.000 Mdpl dianggap sangat cocok untuk pertanian kopi (Sarwan & Prasetyo, 2020).

Jadi Pemerintah Belanda kemudian mengambil bibit kopi Jamaica Blue Mountains (JBM) yang berasal dari Jamaika. JBM terkenal dengan cita rasa ringan, tingkat keasaman yang halus, beraroma bunga dan hampir tidak memiliki rasa pahit. Bibit ini dibawa ke Papua Nugini, kemudian disebar oleh Para Misionaris ke Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Mimika, Paniai dan Deiyai (Sarwan & Prasetyo, 2020; Sintesanews, 2020).

Dari sini muncul pertanian kopi yang membuat Paniai menjadi sentra kopi. Namun, setelah pemerintah Belanda dan para Misionaris pergi, pengelolaan tanaman kopi ini perlahan-lahan surut. Hasil panen kopi yang terjual di pasar berkurang, harga kopi merosot dan tanaman kopi tidak lagi menjadi tanaman

andalan penduduk Paniai. Sejak itu, masyarakat Paniai beralih pada tanaman palawija seperti Ubi untuk memenuhi konsumsi harian (M., 2020).

Namun semenjak beberapa tahun belakangan ini, semangat untuk menanam kopi kembali muncul. Meki Nawipa, Bupati Kabupaten Paniai yang baru terpilih tahun 2018 menangkap peluang dan semangat masyarakat Paniai. Oleh sebab itu penanaman kopi kembali digalakkan lagi pada tahun 2019, sehingga kebijakan membangun Paniai dengan kopi kemudian dirancang, dibuat lalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai.

### **Implementasi Kebijakan Sosial Petani Kopi di Paniai**

Berikut adalah rincian implementasi kebijakan Petani Kopi di Paniai yang akan dilihat dari kacamata analisis Quade untuk implementasi kebijakan sosial (Suharto, 1997, 2014) :

#### **a. Penelitian dan Rasionalisasi**

Kopi Paniai terkenal dengan cita rasa yang khas. Sejak pasar kopi mulai bergairah di tingkat domestik, kopi Paniai semakin dicari. Para ahli kopi dari Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) dan praktisi kopi dari SCOPI (Sustainable Coffee Platform Indonesia) telah melakukan penilaian terhadap kopi Paniai dan memberikan nilai A. Hal ini karena Kopi Paniai memiliki cita rasa yang excellent dan masuk ke Grade A (Sintesanews, 2020).

Program Gerakan Tanam Kopi adalah bentuk respon pemerintah Kabupaten Paniai atas semangat masyarakat untuk kembali menanam kopi. Menurut Bupati Meki Nawipa, setidaknya sudah ada 26.338 pohon kopi yang sudah diproduksi, 185.667 pohon yang ditanam pada tahun 2020 dan sekitar 100.000 pohon yang akan ditanam pada tahun 2021 (Mayor, 2021). Meki Nawipa cukup konsisten dengan ucapannya. Berdasarkan rekapitulasi hasil penanaman kopi per tiga bulan, hingga Agustus 2021 jumlah petani kopi adalah 370 orang. Kemudian pohon kopi yang ditanam berjumlah 165.380 pohon di tanah seluas 4.552 hektare dan tersebar di 42 distrik (Mandiri, 2021; Pademme, 2021).

Namun kebijakan ini tentu saja bukan soal jumlah petani kopi dan jumlah pohon kopi yang ditanam. Pemerintah Kabupaten Paniai pun membangun sistem baik fisik dan non fisik untuk memfasilitasi seluruh petani Kopi di Paniai. Fasilitas yang dibangun adalah Koperasi Harapan Baru Paniai, yakni sebuah koperasi yang memudahkan petani kopi untuk mendapatkan kredit dari Pemerintah Daerah. Dari koperasi ini diharapkan setiap petani dapat menghasilkan 100.000 rupiah per hari. (merdeka). Fasilitas lainnya yang telah dibangun adalah *Grand House*. Pembangunan *Grand House* ini akan diikuti dengan pembangunan pabrik kopi pada tahun ke depannya agar industri kopi di Paniai maju (Pademme, 2021).

Kemudian seluruh petani kopi di Kabupaten Paniai didata dan dikontrol melalui Kartu Petani Kopi. Kartu ini terintegrasi dengan sistem perbankan dan aplikasi Pemerintah Daerah. Kartu Petani Kopi merupakan penanda identitas Petani Kopi di Paniai dan dapat digunakan untuk mengakses beragam bentuk bantuan misalnya dana insentif petani, pupuk, mesin pertanian, pembiayaan dan lainnya. Kartu Petani Kopi juga bisa menjadi alat transaksi penjualan hasil panen petani. Pemegang Kartu Petani Kopi akan secara otomatis teregistrasi dalam Asosiasi Petani Kopi Kabupaten Paniai (Pademme, 2021). Pemerintah Kabupaten Paniai menyatakan bahwa cara ini dipilih agar bantuan untuk para petani kopi dapat disalurkan tepat sasaran dan dapat dikontrol oleh pemerintah.

Kemudian untuk pemasaran sendiri, petani kopi Paniai diarahkan untuk menjual hasil kopi mereka kepada mitra Pemda yakni Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema). Menurut salah satu petani kopi di Kabupaten Paniai, Kris, satu kilogram kopi bisa dihargai hingga kurang lebih Rp. 80.000 tergantung kualitas kopi. Harga ini menurut Kris sangat bagus dibandingkan sebelum kebijakan menanam kopi ini ada. Sebelumnya hasil kopi Kris ditumpuk saja di Gudang menunggu pembeli yang hanya akan menawarnya harga Rp 30.000- Rp 50.000 tanpa memandang kualitas (Econusa, 2020).

Pemerintah Kabupaten Paniai juga mendorong seluruh instansi pemerintah daerah untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam Gerakan Tanam Kopi ini melalui strategi Upaya Pengembangan Kopi Berbasis Masyarakat (UPKBM). Dalam strategi ini, semua pihak harus terlibat misalnya Dinas Perkebunan dan Pertanian bertanggung jawab atas budidaya kopi di bagian hulu dari penanaman hingga pasca panen. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab pada bagian hilir, yaitu pengolahan dan pemasaran kopi siap saji termasuk menyiapkan Kafe Kopi. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan masyarakat kampung berperan untuk menyiapkan dan memastikan keterlibatan warga kampung dalam pengembangan kopi (Pemerintah Provinsi Papua, 2020).

#### **b. Nilai-Nilai**

Dalam program Gerakan Tanam Kopi ini, pemerintah Paniai menggandeng beberapa lembaga untuk menjadi mitra, yakni Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) dan Institute Pertanian Bogor (IPB). Namun mitra utama pemda adalah Yapkema di mana Yayasan inilah yang menjadi motor penggerak masyarakat Paniai terutama masyarakat di distrik-distrik. Yapkema bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; Dimana pembangunan sendiri diyakini Yapkema sebagai suatu proses untuk

membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan manusia, perubahan perilaku manusia, dan pengorganisasian masyarakat (Yapkema, 2015).

Yapkema menganut pemahaman bahwa pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah situasi dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses membangun, sebagai upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri; Pemberdayaan masyarakat bisa berhasil jika kelompok komunitas atau masyarakat mampu menjadi agen pembangunan atau menjadi subjek atau menjadi motor penggerak, bukan hanya penerima manfaat atau objek saja.

Yapkema bergerak sebagai fasilitator, penggerak dan pendorong masyarakat untuk bertani dan berkebun di Kawasan Meepago melalui jenis tanaman dan ternak seperti pengembangan komoditas tanaman jangka panjang (Kopi Arabika Papua), pengembangan budidaya sayuran kol, wortel, kentang, ubi jalar dan bawang, budidaya ikan air tawar, peternakan babi, dan pengolahan limbah menjadi energi biogas dan pupuk organik.

Dalam pemberdayaan tersebut, Yapkema memilih dan mendidik beberapa petani atau pekerja kebun untuk menjadi fasilitator dan petani contoh. Pola pengembangan ini dipilih agar menumbuhkan kepercayaan diri pada petani dan alam sekitarnya serta harapan bahwa masyarakat Paniai bisa mengusahakan kesejahteraan dari diri mereka dan alam sekitar mereka tanpa harus bergantung dari bantuan luar. Oleh sebab itu pengembangan usaha kelompok dampingan Yapkema organik, tidak melibatkan bahan kimia yang berlebihan karena dapat menyebabkan ketergantungan pada pasokan bahan dari luar dan membutuhkan biaya yang besar untuk belanja.

Strategi kerja yang dilakukan oleh Yapkema adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan petani melalui: penyuluhan, pelatihan, seminar, lokakarya, studi banding; (2) mendorong adanya kebijakan pemerintah yang dapat memprioritaskan pengembangan potensi unggulan daerah; (3) mendorong adanya perusahaan swasta di wilayah Meepago sebagai penyedia pasar yang menyediakan fasilitas pertanian hingga modal usaha berupa kredit kecil bagi pengembangan budidaya perkebunan dan pertanian; (4) Melakukan kajian terhadap pengetahuan lokal (Yapkema, 2015).

Semangat dan nilai Yapkema inilah yang sejalan dengan pemerintah daerah Kabupaten Paniai yang menginginkan agar Paniai bisa mandiri tanpa bergantung pada pihak luar. Dengan tanah Paniai yang kaya, Kopi dianggap sebagai salah satu komoditas penting yang bisa menjadi awal dari upaya

penguatan dan kemandirian ekonomi masyarakat Paniai. Bahkan oleh masyarakat Kopi disebut sebagai emas merah karena memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Paniai tanpa menyebabkan pertikaian serta sangat mudah diakses yakni hanya dipetik.

### **c. Politik**

Secara keseluruhan dari hasil studi sumber-sumber berita dan dokumen, tidak ada atau belum ada kekuatan politik yang menentang kebijakan ini yang terungkap. Sejauh ini baik dari pihak Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat hingga masyarakat sendiri, belum terlihat adanya friksi atau pertentangan. Sejauh pengamatan ini, banyak pihak yang mendukung program ini.

## **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kebijakan pulang kampung untuk membangun melalui Program Petani Kopi untuk Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Paniai sudah memenuhi syarat sebagai kebijakan sosial. Oleh sebab itu bagian berikut akan melihat program tanam kopi yang memberdayakan masyarakat Paniai dengan lima tahapan pemberdayaan (Suharto, 1997, 2014) yang dirincikan sebagai berikut :

### **a. Pemungkinan (*Enabling*)**

Kebijakan menanam kopi ini merupakan salah satu kebijakan sosial yang progresif untuk membangun masyarakat Paniai menjadi mandiri. Untuk memulai kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Paniai bersama dengan SKPD dan mitra yang bekerja berupaya untuk menciptakan suasana atau iklim agar masyarakat Paniai dapat menjadi Petani Kopi dengan memberikan bibit, memberikan pendampingan dan pelatihan, menyediakan dana dan menyiapkan sarana dan prasarana dari penanaman awal hingga penjualan kopi.

Dengan iklim seperti ini, Pemerintah Kabupaten Paniai sedang mengusahakan agar potensi Petani Kopi dapat berkembang dengan maksimal. Dan pemerintah Kabupaten Paniai telah mampu membeaskan siapapun masyarakat Paniai dapat dan bisa menjadi kopi karena sekat-sekat kultural dan struktural telah dihilangkan oleh pemerintah daerah.

### **b. Penguatan (*Empowering*)**

Pada tahapan ini pelaksanaan kebijakan Gerakan tanam kopi sudah memenuhi syarat dalam kebijakan sosial yang memberdayakan, karena telah memperkuat pengetahuan dan kemampuan para petani Kopi melalui pelatihan dan

pendampingan yang dilakukan bersama Yapkema serta berupaya memenuhi kebutuhan petani kopi melalui Kartu Petani Kopi.

#### **b. Perlindungan (*Protecting*)**

Cara pemerintah kabupaten daerah Paniai melindungi petani kopi adalah membuat Kartu Petani Kopi. Kartu ini digunakan pemerintah untuk mendata dan mengontrol tahapan penanaman kopi mulai dari awal hingga tahap penjualan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam penanaman kopi dan tidak terjadi persaingan tidak sehat antar masyarakat yang lemah dan kuat.

Selain itu semua masyarakat diberikan 50 bibit kopi gratis untuk lahan baru. Jika ingin lebih aka dikenakan pembayaran. Selain itu pemerintah juga telah menetapkan ke mana hasil kopi dijual dan berapa harga untuk setiap satu kilogram kopi agar tidak ada tengkulak yang membeli dengan harga murah dan menyiksa petani kopi. Dengan cara seperti ini Pemerintah Kabupaten telah menetapkan kebijakan sosial yang melindungi masyarakat Paniai, terkhususnya Petani Kopi.

#### **d. Penyokongan (*Supporting*)**

Penyokongan adalah upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar individu atau masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya agar masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang lemah dan terpinggirkan. Upaya-upaya ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui beberapa aturan serta memberikan motivasi-motivasi bagi masyarakat Paniai untuk berjuang membangun Paniai dengan kekuatan dari alam Paniai.

#### **e. Pemeliharaan (*Fostering*)**

Pada tahapan ini adalah tahap di mana Pemerintah Kabupaten Paniai berupaya memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat di Paniai. Hal ini terlihat dari Bupati yang mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam program ini melalui Upaya Pengembangan Kopi Berbasis Masyarakat (UPKBM). Dari sini terlihat upaya pemerintah kabupaten untuk merangkul semua pihak agar terjadi keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan berusaha, dalam hal ini menjadi Petani Kopi tanpa ragu.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pelaksanaan kebijakan membangun kampung melalui Gerakan tanam kopi di Kabupaten Paniai, setidaknya selama hampir satu tahun ini telah berjalan dengan

baik. Kebijakan ini mendapat sambutan baik dan hangat serta telah membangkitkan semangat dari masyarakat Paniai untuk kembali menanam Kopi, tanaman yang sempat ditinggalkan bertahun-tahun. Antusiasme yang tinggi terhadap kebijakan ini bisa jadi muncul karena kebijakan ini sendiri telah memenuhi aspek-aspek yang memberdayakan masyarakat yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Diharapkan ke depannya penelitian ini bisa dilanjutkan dengan teknik pengambilan data wawancara di mana semua pihak terkait kebijakan ini mulai dari Bupati hingga mitra pendamping dapat diwawancara dan digali. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih diberikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih yang memberikan dukungan demi pelaksanaan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Econusa. (2020, November 24). Kopi Paniai Emas Menyambung. *Kumparan*.  
<https://kumparan.com/econusa/kopi-paniai-emas-merah-penyambung-kehidupan-1ueQOS0FP4L>
- M., D. (2020). Paniai Serius Kembangkan Kopi. *Berita Satu*.  
<https://www.beritasatu.com/photo/38543/paniai-serius-kembangkan-kopi>
- Mandiri, P. (2021). *Pusat Data*. Kabupaten Paniai.  
[https://paniaimandiri.id/welcome/data\\_center](https://paniaimandiri.id/welcome/data_center)
- Mayor, R. J. (2021, September 3). Geliat Produksi Kopi Lokal Asal Paniai. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/geliat-produksi-kopi-lokal-asal-paniai-papua.html>
- Pademme, A. (2021, August 31). Rencana Pendirian Pabrik Kopi di Paniai. *KBR*.  
[https://kbr.id/nusantara/08-2021/rencana\\_pendirian\\_pabrik\\_kopi\\_di\\_paniai/106198.html](https://kbr.id/nusantara/08-2021/rencana_pendirian_pabrik_kopi_di_paniai/106198.html)
- Palen, H. (2021, April 24). Bantu Modal Usaha Bupati Meki Nawipa Terus Dorong Semangat Petani Kopi di Paniai. *NokenLive*.  
<http://www.nokenlive.com/2021/04/24/bantu-modal-usahabupati-meki-nawipa-terus-dorong-semangat-petani-kopi-di-paniai/>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2020). *Gerakan Tanam Kopi di Paniai Diapresiasi*. Papuago.Id. <https://papua.go.id/view-detail-berita-6409/gerakan-tanam-kopi-di-paniai-diapresiasi.html>
- Sarwan, T., & Prasetyo, V. (2020). *Selayang Pandan Kopi Paniai*. ECONUSA.  
<https://econusa.id/id/ecoblog/selayang-pandang-kopi-paniai/%0A%0A>

- Sintesanews. (2020). Demi Pengembangan Pertanian Kopi, Bupati Paniai akan Berkantor di Kebun. *Sintesa News*. <https://www.sintesanews.com/demi-pengembangan-pertanian-kopi-bupati-paniai-akan-berkantor-di-kebun/>
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Bandung.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT REFIKA ADITAMA.
- Wagadei, R. (2018, December 11). Ini Tujuan Bupati Paniai Canangkan Program Wajib Tanam Kopi. *Wagadei*. <http://wagadei.com/2018/12/11/ini-tujuan-bupati-paniai-canangkan-program-wajib-tanam-kopi/>
- Yapkema. (2015). *Tentang Kami*. Yapkema.Org. <https://yapkema.org/tentang-kami/>